

KONSEPSI PEMBINAAN MENTAL DALAM MEMBANGUN KARAKTER HAKIM MILITER

I. PENDAHULUAN.

Pada saat ini para ahli mengatakan dengan era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) yang mengacu pada lingkungan bisnis yang semakin bergejolak, kompleks, dan semakin tidak pasti yang telah menjadi hal biasa dalam satu dekade terakhir.¹ Kehidupan sekarang semakin kompleks dengan perubahan yang sangat cepat, dan persaingan yang tidak bisa dihindari, serta pertukaran nilai yang tidak bisa dibendung. Kemajuan filsafat, sains, teknologi, telah menghasilkan kebudayaan yang semakin maju, proses itu disebut globalisasi kebudayaan. Namun kebudayaan yang semakin maju mengglobal ternyata sangat berdampak terhadap aspek moral.²

Negara Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat dinamis diberbagai aspek kehidupan. Bukan hanya secara fisik, namun makna keindonesiaan kita mengalami pertumbuhan dan

¹ Nurliah Nurdin, *Sistem Manajemen Nasional*. 2020

² Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islami*. Remaja Rosda Karya. 2008

perkembangan non fisik yang cepat. Selain lingkungan eksternal Indonesia yang mengalami pertumbuhan dan perubahan, juga lingkungan internal Indonesia mengalami perubahan, pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan itu membuat apa yang tadinya teratur menjadi rumit (*complex*) dan semerawut (*chaos*). Permasalahan tersebut tidak bisa kita hindari karena globalisasi kebudayaan itu bagaikan udara, bila kita menghindar berarti kita tidak bisa bernafas.³

Globalisasi yang ditandai dengan derasnyanya arus informasi sangat kuat tanpa disadari telah mengakibatkan lunturnya nilai-nilai luhur budaya bangsa dan berpotensi mempengaruhi tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat menjadi tantangan dan ancaman terhadap sendi-sendi kehidupan bangsa diberbagai aspek. Fenomena ini dapat dilihat mulai dari maraknya aksi perilaku intoleransi, ujaran kebencian, *money politic*, korupsi, penyimpangan seksual, penyalahgunaan narkoba, suap sampai kepada pelanggaran hukum. Pelanggaran ini terdapat hampir di setiap lingkungan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga, serta dilakukan oleh berbagai profesi, termasuk para penegak hukum yang saat ini menjadi sorotan publik.

Jika dilihat dari kasus-kasus pelanggaran hukum yang semakin marak terjadi di Indonesia saat ini dilatarbelakangi

³ Ahmad Sanusi, *Enam Sistem Nilai*. Nuansa Cendikia. 2017

oleh krisis moral dan lemahnya mental bangsa.⁴ Hal senada disampaikan oleh Natsir bahwa lemahnya mental disebabkan oleh lemahnya pemahaman agama, rendahnya pemahaman etika politik, etika berbangsa dan bernegara, adanya ketidakadilan, kurangnya keteladanan dan lemahnya penegakan hukum.⁵

Kondisi di atas akan menjadi gunung es apabila tidak segera disikapi dengan bijak dan disertai tindakan yang efektif akan berimplikasi terhadap pelemahan karakter khususnya para penegak hukum di lingkungan militer. Mereka dituntut memiliki komitmen terhadap Prinsip-prinsip Dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.⁶ Disini konsep pembinaan mental TNI erat kaitannya dengan nilai-nilai yang terdapat pada kode etik hakim termasuk hakim militer. Maka dalam beberapa aspek pembinaannya relatif sama dan memiliki tujuan yang sama yaitu terwujudnya prajurit bermental tangguh.

⁴ Seminar Nasional , *Aktualisasi Nilai-Nilai Kesatuan dan Persatuan Dalam Kebhinekaan* , Dikreg XLIV Sesko TNI 2017.

⁵ Nanat Natsir, *Membangun Masa Depan Bangsa Melalui Etika Dan Moral elit Politik Guna Mewujudkan Kepemimpinan Nasional Yang Kuat*, Nusantara Education Review. 2009.

⁶ Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 *Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*.

Penulisan ini menggunakan metode *desk study*/studi literatur, yaitu melakukan pengkajian terhadap nilai-nilai komponen pembinaan mental TNI (rohani, ideologi, kejuangan, dan kejiwaan) yang relevan dalam membangun karakter Hakim Militer yang bermartabat sesuai nilai-nilai karakter yang relevan dengan perkembangan tuntutan profesi Hakim Militer.

II. PEMBINAAN MENTAL DALAM MEMBANGUN KARAKTER HAKIM MILITER

Naskah pembahasan pembinaan mental dalam membangun karakter Hakim Militer dilandasi dengan landasan teologi, filosofi dan teori dengan uraian sebagai berikut:

A. Landasan Teologi

Agama sebagai ajaran yang mengarahkan manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan kehidupan lahir batin di dunia sampai akhirat. Dengan agama manusia akan memahami hakikat kehidupan, bagaimana menjalani kehidupan serta tujuan hidup itu sendiri. Ada tiga pokok ajaran yang terdapat dalam Islam yaitu tauhid, syariat dan akhlak. Sebagai sumber utama dari pokok ajaran itu adalah berasal dari Al Quran, hadits dan ijtihad. Dari kalangan para

ulama, sumber paling utama itu adalah Quran dan hadits (sunnah).⁷

Agama akan menjadi pedoman jika ditransformasi dengan sistematis melalui pendidikan sehingga manusia dapat mengimani, menggali dan mengamalkannya sesuai kaidah yang benar. Dengan menjalankan agama yang benar manusia akan memiliki kesempurnaan akhlak secara tidak langsung dia akan menjadi agen perubahan yang holistik dimanapun dia berada. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁸

Berdasarkan definisi di atas, ada satu pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya yang berkaitan dengan pembangunan mental atau karakter, yaitu memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

⁷ Sofyan Sauri, Pendidikan Karakter, 2015

⁸ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Nugroho Notosusanto mengungkapkan bahwa⁹:

“Agar Pendidikan kita mulai memperhatikan humaniora. Untuk lebih manusiawi, supaya manusia lebih humaniora, memang diperlukan sesuatu yang bersifat ruhaniah, *“something spritua”*. Dilepaskan dari dimensi ruhaniahnya, kemanusiaan akan menjadi manusia yang berpenyakit. Semakin banyak orang pandai tetapi semakin sulit dicari orang jujur,” begitu keluh Jean Jaques Rousseau. Rousseau menganggap penyakit kemanusiaan timbul karena manusia hanya mempertajam akalinya saja dan mengesampingkan hati nuraninya.”

Demikian Islam mengajarkan akhlak sebagai pedoman dalam keberhasilan hidup. itu keberhasilan seseorang ditentukan dengan karakter atau pribadinya. Oleh karena itu akhlak harus tetap dibina secara terus menerus dengan melihat berbagai aspek. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.” (HR. Ahmad).

⁹ Jalaluddin Rahmat, Renungan Sufistik, 1996

B. Landasan Filosofis

Pembahasan dalam tulisan ini adalah pembahasan tentang pembinaan karakter yang erat kaitannya dengan filsafat rekonstruksionisme. Aliran ini menjunjung perubahan tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang lebih maju. Tata susunan kebudayaan yang bercorak modern mengembangkan potensi-potensi manusia baik fisik, intelegensi dan spiritual. Selanjutnya agar potensi tersebut semakin produktif maka perlu perubahan yang efektif sehingga mencapai kesempurnaan sesuai tujuan pendidikan.¹⁰

Landasan filosofis yang mendasari pemikiran adalah landasan idiil yaitu Pancasila sebagai falsafah negara yang menjadi pedoman hidup dan penuntun cita-cita Bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Kemudian sebagai landasan konseptual adalah Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Untuk landasan operasional adalah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sesuai.

C. Landasan Teori

Untuk mengupas konsep pembinaan mental dan pembangunan karakter maka perlu adanya teori yang melandasinya antara lain:

¹⁰ Sukardjo, M. dan Komarudin, Ukim, Landasan Pendidikan. 2009

1. Teori Pembelajaran

a. Teori Konstruktivisme

Teori Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Teori ini lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia sesuai dengan pengalamannya. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru, apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis.

b. Teori Behaviorisme

Teori behaviorisme adalah teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia, memandang individu sebagai makhluk reaktif yang member respon terhadap lingkungan, pengalaman dan pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. Menurut teori belajar ini adalah perubahan tingkah laku, seseorang dianggap belajar sesuatu bila ada menunjukkan perubahan tingkah laku. Diantara

tokoh-tokohnya antara lain Ivan Petrovich Pavlov, John Broadus Watson dan Burrhus Frederik Skinner.

Menurut teori ini yang terpenting adalah masukan atau input yaitu berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respons. Sedangkan apa yang terjadi diantara stimulus dan respons itu dianggap tidak penting diperhatikan sebab tidak bisa diamati. Yang bisa diamati adalah stimulus dan respons, misalnya stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa tersebut dalam rangka membantu siswa untuk belajar. Stimulus ini berupa rangkaian alfabet, beberapa kalimat atau bacaan, sedangkan respons adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang diberikan gurunya.

c. **Teori Humanistik**

Pada dasarnya teori ini memiliki tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Hal ini senada dengan pendapat Tafsir¹¹, bahwa pendidikan adalah suatu proses belajar menuju kesempurnaan manusia sebagai hamba dan khalifah di dunia. Oleh karena itu proses belajar boleh dianggap berhasil apabila si pembelajar memahami tentang lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain si pembelajar dalam

¹¹ Ahmad Tafsir, *Pengantar Filsafat Islam*, 2008

proses belajarnya harus berusaha lambat laun agar ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya.

Menurut teori ini bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilaksanakan manusia baik aspek rohaniah maupun jasmani yang berlangsung dengan berbagai tahapan. Pendidikan dalam makna yang umum, dapat berarti sebagai komunikasi terorganisasi dan berkelanjutan dalam bidang peradaban yang disusun untuk menjadi kegiatan belajar. Disamping itu pendidikan merupakan sarana yang menumbuh-kembangkan potensi-potensi kemanusiaan untuk bermasyarakat dan menjadi manusia yang sempurna¹²

2. Teori Pembinaan

Berdasarkan berbagai teori mengenai pembinaan, maka dapat difahami bahwa “pembinaan” merupakan usaha yang dilakukan dengan sadar, teratur, terencana dan terarah untuk memperbaiki watak manusia sebagai pribadi dan makhluk sosial melalui pendidikan agar menjadi orang yang mempunyai kepribadian utuh dan matang. Pembahasan tentang makna Pembinaan akan terkait dengan segala upaya untuk memelihara, merawat,

¹² Muh Suardi, *Pengantar Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, 2006

mempertahankan dan mengembangkan agar tetap berdaya guna serta berhasil guna. Hal ini jika dikaitkan dengan pengembangan sumber daya manusia adalah merupakan bagian dari aspek pendidikan. Pelaksanaan pembinaan menekankan pada sisi praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan¹³. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia, memberikan definisi pembinaan sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur dan terarah serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian manusia dengan segala aspeknya¹⁴

Agar proses pembinaan berjalan dengan lancar, maka perlu dipilih cara yang tepat dalam menyampaikan materi pembinaan. Diantara metode-metode yang dipakai ialah sebagai berikut: 1) Metode ceramah. 2) Metode Tanya jawab. 3) Metode demonstrasi adalah metode yang menggunakan peraga untuk memperjelas suatu pengertian atau menunjukkan suatu proses tertentu. 4) Metode diskusi adalah cara mengajar melalui pengajuan masalah yang pemecahannya dilakukan secara terbuka. 5) Metode team teaching. 6) Metode kerja kelompok.¹⁵

¹³ Harjana, *Pembinaan Arti dan Metodenya*,1991

¹⁴ Departemen Agama RI. *Pola Pembinaan Akhlak Mahasiswa IAIN*.2004

¹⁵ Ishak Abdulhak, *Metodologi Pembelajaran Orang Dewasa*, 2000

3. Teori Pembinaan Mental

Pengertian mental spiritual adalah sesuatu yang berhubungan dengan keadaan mental spiritual atau jiwa seseorang yang mencerminkan suatu sikap, perbuatan atau tingkah laku yang selaras dan sesuai dengan ajaran agama. Secara ideal, orang yang sehat mentalnya adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berusaha secara sadar untuk merealisasikan nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupannya yang sesuai dengan tuntunan agama. Selain itu, kesehatan mental juga merupakan terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya dan lingkungannya, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.¹⁶ Oleh sebab itu, unsur agama (spiritual) merupakan hal yang sangat penting bagi pengupayaan dan penerapan prinsip-prinsip kesehatan mental.

Mental diartikan sebagai kepribadian yang merupakan kebulatan yang dinamik yang dimiliki seseorang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan

¹⁶ Jaelani, AF, *Kesehatan Mental*. 2001

atau terlihat dari psikomotornya mental adalah semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap (attitude) dan perasaan yang dalam keseluruhan dan kebulatannya akan menentukan corak laku, cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan, mengecewakan atau menggembirakan, menyenangkan dan sebagainya¹⁷. Para ahli dalam bidang perawatan jiwa, dalam masalah mental telah membagi manusia kepada dua golongan besar, yaitu golongan yang sehat mentalnya dan golongan tidak sehat mental.¹⁸

Kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman dan tentram, stabil, dan nyaman, serta upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi (penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan).¹⁹ Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Ginanjar A. bahwa mental adalah hal yang abstrak tetapi bisa dirasakan karena menyangkut ketiga komponen kecerdasan yakni EQ (*Emotional Quontient*), SQ (*Spiritual Quontient*), dan (*Intelektual Quontient*) yang menjadi satu kesatuan kepribadian manusia²⁰.

¹⁷ Ida Firdaus, 2014

¹⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Umum*. 1996

¹⁹ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, 1997

²⁰ Ary Ginanjar, *ESQ Emotional Spritual Quotient*, 2001

Untuk selanjutnya, Buku Petunjuk Referensi Bintal TNI Pinaka Baladika Utama menyebutkan bahwa Pembinaan Mental TNI segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang membentuk, memelihara serta meningkatkan dan memantapkan kondisi jiwa anggota TNI berdasarkan Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek) melalui pembinaan mental rohani, pembinaan mental ideology, pembinaan mental tradisi kejuangan, dan pembinaan mental kejiwaan. Dengan pembinaan mental yang utuh diharapkan prajurit TNI menjadi prajurit yang bertakwa, nasionalis, militan dan memiliki kematangan jiwa.²¹

4. Teori Karakter

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KKBI) karakter memiliki sebuah arti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Menurut Michael Novak karakter merupakan “campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejarah.” Sementara itu, Masnur Muslich menyatakan bahwa karakter merupakan nilai-nilai

²¹ Jukref, *Bintal Pinaka Baladhika Utama*, Pusbintal TNI, 2022

perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.

Selanjutnya, Lickona menguraikan karakter menjadi tiga komponen. Pertama, Moral *knowing* atau pengetahuan moral terdiri dari: *moralawareness* (kesadaran atas nilai-nilai moral), *knowing moral* (mengetahui nilai-nilai moral), *perspective taking* (mengetahui berbagai perspektive), *moral reasoning* (mengetahui alasan atas pentingnya moral), *decisionmaking* (menentukan pilihan untuk mengambil tindakan), dan *self knowladge* (mengetahui pengetahuan atas diri sendiri). Kedua adalah moral *feeling*, yang mencakup *conscience* (hati nurani), *self esteem* (rasa percaya diri), *empathy* (merasakan apa yang dirasakan orang lain), *loving the good* (cinta kebenaran), *self control* (kontrol diri), dan *humanity* (kemanusiaan). Sedangkan yang ketiga adalah Moral *action* yang mencakup *competence* (kompetensi), *will* (kemauan) dan *habit* (kebiasaan).²²

²² Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our School can Teach Resoect and Responsibility*, 1992

Sedangkan Muchlas Samani berpendapat bahwa karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat senada juga disampaikan oleh Agus Wibowo, bahwa karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pembentukan karakter terdapat tahapan-tahapan yaitu:

- a. Adanya proses yang diserap melalui internalisasi nilai-nilai rohani, ideologi dan kejuangan
- b. Pembentukan pola pikir secara keseluruhan yang akan membentuk visi
- c. Transformasi visi ke wilayah hati membentuk suasana jiwa yang secara keseluruhan akan membentuk mentalitas
- d. Transformasi mentalitas memasuki wilayah fisik dan melahirkan tindakan atau sikap
- e. Sikap-sikap yang dominan secara keseluruhan menjadi cita kepribadian atau karakter (jati diri).²³

²³ Abdul M. *Pembentukan Karakter*. 2015

Menurut Mulyasa, E, bahwa karakter merupakan sikap yang dapat dibangun melalui pendidikan, sehingga keberhasilan pembangunan karakter sangat ditentukan oleh kemampuan berbagai pihak dalam memahami dan memaknainya. Dalam hal ini diperlukan kesamaan persepsi antara pemerintah, orang tua, guru, dan masyarakat terhadap pendidikan karakter itu, sehingga dalam pelaksanaannya bisa saling mendukung dan saling melengkapi satu sama lain. Pendidikan karakter merupakan upaya untuk membantu perkembangan jiwa baik lahir maupun batin, dari sifat kodratnya menuju ke arah peradaban yang manusiawi dan lebih baik. Pembangunan karakter harus merupakan proses yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir (*never ending process*), sehingga menghasilkan perbaikan kualitas yang berkesinambungan (*continuous quality improvement*), yang ditujukan pada terwujudnya sosok manusia masa depan, dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa.²⁴

5. Teori Kepentingan Nasional

²⁴ E. Mulyasa, *Pendidikan Karakter*, Remaja Rosda Karya, Bandung 2011

Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar dan faktor paling menentukan yang memadu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri²⁵. Hans J. Morganthau yang menjadi pionir dalam teori ini bahwa kepentingan nasional (*national interest*) merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Pendekatan Morganthau dominan dalam studi politik internasional sesudah perang dunia II Romawi.

Konsep pembinaan mental dalam membangun karakter Hakim militer dilakukan dengan empat komponen Bintel sebagai berikut:

A. Bintel Rohani

Sesuai dengan tujuan pembinaan mental rohani untuk membentuk, memelihara dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus membangun kesadaran akan harkat dan martabat manusia dalam kerangka falsafah Pancasila, dan secara khusus menuju terwujudnya prajurit TNI yang Saptamargais, maka peran pembinaan mental rohani terhadap kepribadian prajurit Saptamarga sangat besar. Diharapkan seorang Hakim Militer yang mendapat pembinaan mental rohani dan menghayati dan mengamalkan ajaran agama dengan baik, maka pada

²⁵ Wibowo, *Optimalisasi Kewaspadaan Nasional*, 2018

gilirannya ia akan tampil sebagai prajurit yang Pancasilais sekaligus Saptamargais.

Peran Binroh terhadap Kepribadian Prajurit Saptamarga mengedepankan nilai-nilai ajaran agama yang diaktualisasikan dalam nilai-nilai Saptamarga memberikan makna bahwa prajurit TNI disamping sebagai alat pertahanan negara juga sebagai warga negara, dalam posisinya sebagai warga negara, maka prajurit TNI harus tunduk dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat dan negara. Oleh karena itu, dalam aplikasinya pembinaan rohani memberikan tuntunan dan pedoman bahwa :

1. Agama mengajarkan untuk selalu tunduk dan taat terhadap semua bentuk peraturan, baik peraturan yang datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa maupun peraturan yang dibuat oleh manusia (tegaknya supremasi hukum).
2. Menganjurkan untuk selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, para Rasul (pembawa risalah agama), dan para pemimpin (dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara).
3. Agama mengajarkan persamaan hak dan kewajiban, sehingga sebagai warga negara tidak ada perbedaan dalam perlakuan hukum.
4. Agama mengajarkan untuk menjadi manusia yang gagah berani, tegar dan tabah dalam menghadapi

berbagai bentuk kesulitan/cobaan atau godaan dengan cara mendekatkan diri (takwa) kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

5. Agama selalu mengingatkan agar tidak mudah tergoda dan terpedaya untuk mengikuti keinginan hawa nafsu dan godaan syetan.

6. Agama mengajarkan supaya berbudi luhur dan berakhlak mulia yakni mengedepankan sifat jujur dalam memegang amanah dan bersikap benar dalam bertindak serta adil dalam menghukum.

Disamping itu dalam pembinaan mental rohani yang moderat akan memberikan pandangan bahwa cinta dan membela tanah air adalah salah satu bagian dari iman yang perlu dibuktikan dengan pengorbanan yang dilandasi niat yang Ikhlas demi Tuhan Yang Maha Esa. Pengorbanan yang tulus untuk membela kepentingan bangsa dan negara merupakan bagian dari ibadah, dan bilamana mati dalam memperjuangkan dan mempertahankan eksistensi negara, maka dalam ajaran agama dinilai sebagai syuhada/pahlawan.²⁶

Sebagaimana dikatakan, pembinaan mental menempuh tiga aspek yaitu membentuk persepsi, membentuk sikap dan menanamkan motivasi. Agar prajurit berada dalam Pola

²⁶ Naskah Sekolah Sementara Peranan Binalroh Dalam Pembinaan Prajurit Saptamarga, Tar BFK Nomor KEP/39/V/2011, Hal 8

Sapta Marga, para prajurit harus memiliki persepsi yang benar dan kuat terhadap Sapta Marga, terhadap identitas dan kepribadian prajurit TNI, mempunyai sikap yang tepat dan memiliki motivasi yang kuat sebagai motor untuk melaksanakan, demikian pula dengan pembinaan mental rohani.

1. Membentuk Persepsi Yang Tepat dan Kuat. Setiap prajurit pasti telah memiliki tentang Sapta Marga, tetapi persepsi setiap prajurit tidaklah akan sama kedalamannya. Seperti juga iman kita, meskipun sama-sama satu agama tetapi masing-masing tidaklah sama kedalamannya, semakin dangkal persepsi prajurit terhadap Sapta Marga, prajurit itu semakin mudah goyah, mudah terpengaruhi oleh hal-hal lain. Padahal setiap prajurit diharapkan bahkan dituntut untuk memiliki ketahanan, agar dalam kondisi yang bagaimanapun mentalitas untuk perilakunya tidak berubah, sekalipun ada perubahan tidak akan keluar dari Pola Sapta Marga yang diharuskan, karena itu kita perlu semakin mendalami Sapta Marga agar persepsi kita tentang Sapta Marga semakin dalam dan semakin luas.

Dengan persepsi/pengertian yang dalam dan luas, kita akan semakin mudah memecahkan suatu persoalan dan semakin tepat pemecahan itu. Sebagai contoh misalnya masalah benar (berkaitan dengan Sapta Marga

ketiga). Kita harus membela kebenaran, tetapi dalam realitas hidup, apa yang disebut benar ini kadang-kadang tidak jelas, bila persepsi kita tentang kebenaran sangat dangkal,terlalu mudah kita berbuat kesalahan, sekalipun kita sungguh mau membela, menegakkan kebenaran, tidak mustahil pada kenyataannya kita justeru menginjak-injak kebenaran. Misalnya perbuatan Robinhood Di Indonesia sekarang banyak Robinhood. Saya tahu orang itu kaya-kaya karena ia memeras rakyat kecil yang tak berdaya, saya lalu mencuri, mengkorupsi kekayaan orang itu karena saya mau menolong rakyat yang hidupnya miskin/melarat karena diperas. Perbuatan saya ini benar atau salah ? Contoh ini adalah contoh yang sederhana. Pada kenyataannya suatu kebenaran lebih kompleks lagi sehingga untuk menentukan mana yang benar, bukan soal yang mudah.

Bila saya salah menentukan mana yang benar, lalu bertindak, bukankah ini berarti saya justeru menginjak-injak kebenaran yang harus kita bela dan tegakkan? Seperti sudah diuraikan diatas, bahwa pada kenyataannya banyak orang menggunakan referensi agama untuk menentukan kebenaran. Disinilah peranan pembinaan rohani akan sangat membantu dalam menentukan kebenaran, semakin banyak referensi yang berbeda, keputusan akan semakin kaya sehingga

semakin mendekati kebenaran yang sejati. Pembinaan rohani harus mampu memperdalam dan memperluas wawasan, sebab rohani bukan hanya memandang dari sudut-sudut sesuai kemampuan akal budi manusia, tetapi juga memandang sesuatu dari segi agama, segi adikodrati atau segi wahyu. Ini berarti bahwa kita memperkaya dengan sesuatu yang sangat kaya atau bahkan dapat dikatakan maha kaya. Dengan bimbingan rohani ini kita akan bertindak benar, juga bertindak jujur dan adil. Kita katakan demikian karena kebenaran sejati hanya ada pada ajaran agama yang menjadi pandangan dan tuntunan hidup setiap manusia.

2. Membentuk Sikap. Bukan hanya persepsi, tetapi sekalipun merupakan sesuatu yang kompleks bahkan mungkin lebih kompleks dari persepsi. Sebab sikap bukan hanya ditentukan oleh rasio, pengertian, akan tetapi juga ditentukan oleh kebiasaan, pengalaman, emosi, kemajuan, watak dasar dan sebagainya. Semakin kompleks suatu sikap, semakin matang dan dewasa sikap seseorang, dan sebaliknya semakin sedikit faktor yang membentuk sikap, semakin kekanak-kanakkan (na'if primitif) sikap orang itu. Misalnya, Saya bersikap menolak atau membenci seseorang karena orang itu pernah menipu sebagai manusia yang berkepribadian, atau

marah kepada saya, sikap saya itu kekanak-kanakkan. kita harus menjadi semakin matang dan dewasa dan salah satu unsur kedewasaan adalah sikap kita.

Jadi kedewasaan kepribadian ini bukan semata-mata ditentukan oleh umur, tidak sedikit orang yang sudah berumur diatas lima puluhan tetapi masih kekanak-kanakkan, karena wawasannya sempit dan sikapnya dibentuk hanya oleh satu-dua faktor. Status prajurit TNI dimata masyarakat sebagai sosok yang diandalkan menuntut agar setiap prajurit memiliki kepribadian yang semakin matang dan dewasa. Maka kemauan untuk terus menerus mendewasakan diri bagi prajurit TNI seharusnya menjadi sikap, sebab menjadi dewasa tidak akan selesai. Dinamisme tidak akan mengancam stabilitas, bila dinamisme itu terlaksana secara dewasa.

Usaha memecahkan persoalan secara na'if (kekanak-kanakkan) tidak akan berhasil mencari solusi, melainkan akan membuat persoalan semakin ruwet, Dalam hidup beragama kita juga melaksanakan kebiasaan-kebiasaan, mempunyai pengalaman dan sebagainya. Semua itu akan menjadi faktor-faktor dalam membentuk sikap, maka agamapun akan ikut membentuk sikap. Karena itu pembinaan rohani dalam membentuk sikap sebagai prajurit TNI membutuhkan kearifan, kebijakan untuk dapat melihat dengan tajam, mana sikap

agamawi (*religious attitude*) yang mendukung sikap sebagai prajurit TNI, mana yang membutuhkan aplikasi agar sikap agamawi itu tidak merusak sikap keprajuritannya. Tanpa merugikan kehidupan agamanya tetapi dapat memperkaya sikap prajurit. Hal ini kita akui tidak mudah, namun harus terus diusahakan, sebab aplikasi tidak sama dengan sinkretis, tidak sama dengan eksploitasi terhadap agama.

Dasar aplikasi adalah penghargaan, bukan semata-mata pemantapan, apalagi eksploitasi. Inilah sebabnya usaha pembentukan sikap lewat faktor pembinaan rohani tidaklah mudah. Disamping perbedaan sikap agamawi yang cocok dan yang perlu diaplikasikan, yang paling penting sebenarnya adalah isi dari sikap itu, bukan sikapnya sendiri. Bila isi dari sikap itu dapat kita tangkap dengan baik, penyesuaian atau pengaplikasian dalam sikap sebagai prajurit akan lebih mudah. Misalnya sikap "lemah lembut". Apa isi dari lemah lembut? Jelas sikap lemah lembut tidak sama dengan loyo. Isi yang pokok apa? Cara yang menunjukkan pengertian dan penghargaan atau sesuai dengan kesopanan. Bila demikian kita memandangnya, kiranya tidak akan kita temukan sikap agamawi yang bertentangan dengan sikap prajurit, dengan demikian agama akan memperkaya sikap prajurit.

3. Menanamkan Motivasi. Motivasi adalah penyebab psikologis yang merupakan sumber serta tujuan dari tindakan dan perbuatan seseorang (Dr. Mico Dister ofm). Setiap perbuatan manusia merupakan hasil hubungan timbal balik yang dinamis antara tiga faktor, ketiganya selalu berperan dalam tindakan atau perilaku manusia, meskipun kadar masing-masing dapat berubah-ubah. Ketiga faktor itu ialah :

- a. Suatu dorongan spontan dan alamiah yang ada dalam diri manusia. Dikatakan spontan dan alamiah karena muncul bukan karena kehendak manusia atau sengaja (nafsu, ngantuk dan sebagainya). Ini yang disebut naluri.
- b. Keakuan manusia yang merupakan pusat kepribadiannya. Secara sadar, tahu dan mau manusia menanggapi positif dorongan itu, ia mengiyakan, menyetujui dorongan itu, sehingga ia dapat berkata "itu perbuatanku!".
- c. Situasi atau lingkungan seseorang. Situasi sekitar ikut mendorong perilaku seseorang artinya menyetujui atau menolak. Maka pertanyaannya sekarang adalah Motivasi agama apa yang dapat ditanamkan agar prajurit lebih didorong berperilaku karena adanya motivasi Teologis/Philosophis.

Motivasi ini mengajarkan bahwa pelaksanaan tugas sebagai prajurit adalah realisasi dari hubungan manusia dengan Tuhan yang tampak nyata, dalam hubungan antar manusia (lihat definisi agama). Disamping itu adanya kepercayaan kepada Tuhan akan memberikan kekuatan moril, sehingga orang mampu mengatasi situasi frustrasi.

Penelitian yang diadakan SA. Stauffer terhadap prajurit Amerika yang ditempatkan di garis depan pertempuran menghasilkan data antara lain sebagai berikut:

- a. Saat bertempur dengan gencar.
 - 1) Mereka berdoa : 75%
 - 2) Tidak berdoa, tetapi ingat akan doa : 17%
 - 3) Sama sekali tidak ingat doa (tidak peduli) : 8%

- b. Setelah kembali pulang, pertanyaan yang sama mendapatkan jawaban sebagai berikut :
 - 1) Menjadi lebih taat beragama : 29%
 - 2) Menjadi kurang beragama (pada umumnya marah kepada Tuhan) : 30%
 - 3) Tetap, tidak berkurang dan tidak bertambah ketaatannya beragama : 41%

Tetapi dari semua itu 79 % menyatakan bahwa imannya akan Tuhan bertambah kuat, orang yang tidak mau berdoa karena marah kepada Tuhan justru menunjukkan imannya kepada Tuhan lemah. Data ini menunjukkan ada perbedaan antara perbuatan agamawi (*religius action*) dan iman/kepercayaan kepada Tuhan.

Iman kepada Tuhan sungguh merupakan motivasi yang memperkuat moril.

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Vergole dan Bustamante terhadap orang-orang yang frustrasi (bukan militer).

- a. Dengan berdoa menjadi lebih bersemangat mengatasi frustrasi (berjuang, aktif): 54%
- b. Dengan berdoa menjadi tawakal, menerima (pasif): 29%. Putus asa, meskipun sudah berdoa: 17%.

Frustrasi yang paling berat dihadapi manusia adalah frustrasi karena maut (kematian). Hal ini berkaitan erat dengan makna dan arti hidup. Apa arti hidup, bila toh berkaitan dengan kematian.

Carl Gustaf Jung (Psikiater) berpendapat bahwa ajaran agama akan adanya kehidupan kekal dalam Tuhan, Sang Pencipta, merupakan obat yang manjur

untuk menyembuhkan penyakit neorosis karena frustasi menghadapi maut.

1. Tradisi kehidupan beragama. Tradisi beragama ini dapat merupakan motivasi yang memperkuat kesadaran moral karena membentuk suasana dimana orang merasa enggan (rikuh; Jawa) berbuat dosa/kesalahan.

a. Orang harus bertindak adil, misalnya karena hal itu dituntut oleh kemanusiaannya (cfr. Pancasila). Bila terlalu ditekankan bertindak adil itu karena dikehendaki Tuhan saja, orang akan merasa tidak perlu bertindak adil, bila seumpama Tuhan tidak ada (ia tidak percaya kepada Tuhan).

b. Bahaya kedua adalah memeralat agama sebagai sarana untuk menjamin kehidupan hidup demi untuk kepentingan duniawi tertentu dan keuntungan orang/kelompok tertentu.

2. Adanya hidup kekal.

Seperti dikatakan di atas, ajaran mengenai hidup kekal, berkaitan dengan makna dan arti hidup di dunia ini. Ajaran ini dapat menjadi motivasi bukan hanya untuk menyembuhkan neurosis (cfr. C. G. Jung), tetapi juga memperbesar semangat dan kekuatan karena fungsi

intelektual manusia, yang mau mengerti memahami segala sesuatu, dipuaskan. Fungsi intelektual ini mendorong manusia merasa manusia merasa perlu memiliki orientasi pada peta kehidupan. Tidak dapat menerima bila hidup ini pada akhirnya tanpa tujuan, tanpa arti, manusia tidak mau hidupnya sia-sia dan absurd.

Disinilah ajaran mengenai hidup kekal memberikan jawaban atas pertanyaan manusia yang mendasar dan vital ini, yang tidak diperoleh dari filsafat atau ilmu pengetahuan lain.

3) Tujuan hidup. Dari bawah sadar manusia mencari tujuan hidup yang paling akhir, karena makna hidup tidak terjawab kecuali oleh ajaran agama. Dari sinilah ada pada manusia suatu ketakutan, tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya ditakuti, suatu ketakutan tanpa obyek (kita bedakan disini dari gejala psikologis ketakutan tanpa obyek yang merupakan sakit mental).

Pada umumnya ketakutan tanpa obyek yang dimaksud disini merupakan kekuatan yang tersembunyi, terselubung dalam gejala ketakutan yang lain. Manusia menyadari kerapuhan, kefanaan, ketidakberdayaan, lalu muncul perasaan seperti dalam "jurang ketiadaan". Manusia menjadi cemas, tetapi dengan ajaran agama,

kecemasan itu dapat terobati karena hidupnya mempunyai arah tertentu, sekalipun tujuan itu harus dicapai melalui kematian lebih dahulu, Maka ajaran mengenai tujuan hidup akhir merupakan motivasi yang mendorong keberanian.²⁷

B. Bintal Ideologi

Pembinaan Mental Ideologi memiliki makna dan nilai strategis betapa pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara dan ideologi bangsa bagi para Hakim Senior Peradilan Militer Seluruh Indonesia. Sebagaimana fungsi esensial Hakim Militer adalah personel TNI yang memiliki kewenangan mengadili pelaku tindak pidana adalah prajurit²⁸. Oleh karena itu tugas Hakim Militer untuk mengadili dan memutus perkara bertujuan agar keadilan dapat ditegakkan, keputusan perkara yang diambil sungguh bermanfaat bagi kehidupan dinas militer, dan kepastian hukum dapat tercapai. Sudah layak dan sepantasnyalah setiap Hakim Militer menghadirkan integritas mental ideologi selalu dituntut untuk **menjaga soliditas, memiliki kecintaan kepada NKRI, dan memiliki disiplin dan etos kerja** dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi ancaman dan

²⁷ Naskah Sekolah Sementara Peranan Agama Dalam Kehidupan prajurit, Sugati Bintal Nomor KEP/7/IV/2009, Hal 7)

²⁸ Letkol Chk James F. Vandersloot, SH, MH, *Upaya Mesujudkan Peradilan Militer yang Bersih dan Berwibawa*, <https://dilmil-madiun.go.id.>, diunduh, 27 Oktober 2022.

gangguan yang akan merongrong Pancasila dan UUD Negara RI 1945²⁹.

Pancasila, sebagai ideologi bangsa dan *code of conduct* Prajurit TNI yang terangkum dalam Saptamarga mesti mampu menjawab setiap persoalan yang dihadapi Hakim Militer dalam memutuskan perkara melalui pertimbangan dan pendekatan ideologis yang diimplementasikan dalam relevansi tugas aparat hukum di lingkungan TNI yang punya integritas dalam mendukung tugas pokok TNI. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila telah dirumuskan oleh pendahulu bangsa semestinya menjadi karakter hakim militer, yang menumbuhkan nasionalisme. Diharapkan bahan materi *character building* pembinaan mental ideologi bagi pelatihan teknis yudisial hakim senior peradilan militer seluruh Indonesia ini dapat memberikan masukan para peserta untuk mengembangkan pemikiran, mencari solusi yang tepat dalam rangka pembinaan mental ideologi kepada prajurit TNI, sehingga terwujud jiwa nasionalisme prajurit TNI yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. Eksistensi TNI: Disiplin dan loyalitas

²⁹ Pusbintal TNI, *Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Mental Ideologi di Lingkungan TNI*, 2018, hal.5.

Berbicara mengenai disiplin dan loyalitas TNI pada negara adalah panutan bagi seluruh anak bangsa. Eksistensi TNI tidak bisa dibandingkan dengan tentara negara-negara lain. Karena perjalanan TNI dalam sejarah kebangsaan memiliki tempat istimewa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu rujukan, dalam pidato dokumen Angkatan Perang RI tahun 1950, Presiden memberikan amanatnya demikian: *“Angkatan Perang RI tidak bisa dipisahkan kedudukannya dari rakyat Indonesia... Asal Angkatan Perang, kedudukannya, tujuannya: berasal dari rakyat Indonesia, yang memikul suatu tugas untuk menjamin keamanan rakyat”*³⁰.

Berangkat dari sejarah pembentukannya, pembentukan jatidiri TNI yang diikat oleh kode etik Saptamarga dan Sumpah Prajurit sebagai doktrin pembentukan kedisiplinan prajurit TNI telah membentuk pola kedisiplinan utama, yakni: Disiplin Ideologi (Saptamarga, Marga Pertama). Lantas, bagaimana cara TNI dapat menjaga ideologi Pancasila itu ditulis dalam konteks sebagai patriot Indonesia (Marga Kedua) memberikan warna kedisiplinan bahwa TNI tidak hanya setia pada Pancasila, tetapi juga membela Pancasila

³⁰ Teks Amanat Presiden RI, Sukarno, pada Hari Ulang Tahun Angkatan Perang ke-5, <https://anri.sikn.go.id>, diunduh 27 Oktober 2022.

sampai titik darah penghabisan. Dalam Sumpah Prajurit juga tampak dimana TNI setia kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Setia pada disiplin diterapkan dalam disiplin komando dalam disiplin kemiliteran.

Demikianlah, politik TNI berpegang pada politik kenegaraan yang tunduk kepada pemerintahan yang sah siapapun pemimpinnya/presidennya (sebagai Panglima Tertinggi TNI atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara) yang dipilih dari mekanisme ketatanegaraan yang demokratis dan konstitusional berdasarkan demokrasi dan nomokrasi (*Nomokrasi adalah kedaulatan hukum, yaitu pengelolaan suatu negara berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum*) yang dijamin keberlakuannya oleh Undang-Undang Dasar Negara RI 1945³¹. Disiplin ideologi dan disiplin komando. Inilah yang menjadi modal dasar TNI untuk menjaga Pancasila di era perang ideologi yang terjadi di tengah masyarakat kita saat ini.

2. Tantangan Negara Pancasila: Menjaga dan Merawat Warisan Bangsa

³¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2002, hal. 420-452.

Hasil studi dari Labkurtannas per-Desember 2016 yang mengukur ketahanan Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa menunjukkan level rawan atau kurang tangguh³². Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut: **Pertama**, masih rendahnya kereligiusan dan ketakwaan masyarakat dalam menjalani kehidupan dan ketakwaan masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial-kebangsaannya. **Kedua**, masalah kesederajatan dimana jurang si miskin dan si kaya semakin melebar dan mendalam. Jika tidak diwaspadai akan menghadirkan kesenjangan sosial yang menjauhkan pula karakter masyarakat Indonesia yang kental dengan kekuatan gotong royongnya: *holopis-kuntul-baris* buat kepentingan bersama. **Ketiga**, masalah solidaritas sosial dan toleransi berkaitan dengan lemahnya kesetiakawanan sosial. **Keempat**, masalah kesatuan wilayah, yang menyisakan masih adanya wilayah-wilayah tertinggal. **Kelima**, kewajiban sosial, berkaitan dengan rendahnya kemauan masyarakat dalam membantu masyarakat lainnya yang belum sejahtera. **Keenam**, beretika politik berkaitan dengan maraknya penyelenggara negara memarginalkan nilai-nilai Pancasila dalam berinstitusi.

³² Tim Dewan Analisis Strategis- Badan Intelijen Negara, *Ketahanan Ideologi Pancasila 2018-2030*, Penerbit DAS-BIN, 2017, hal. 9-19.

Fungsi-fungsi Pancasila sebagai dasar falsafah negara (*philosofische grondslag*), sebagai dasar negara (*grundorm*), sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*) dan menjadi ideologi bangsa. Pancasila juga sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia, menjadi perjanjian luhur pendiri bangsa Indonesia dan sebagai ilmu pengetahuan. Ini semua menjadikan Pancasila menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Ada tiga syarat Pancasila sebagai ideologi menjadi hidup (*Pancasila as a living ideology*) yaitu, Pancasila diyakini kebenarannya, Pancasila dipelajari, dimengerti serta dipahami dan Pancasila dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi Pancasila saat ini mengalami proses deideologi yang sangat sistematis. Dimulai dari awal reformasi mencabut Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang P4, membubarkan BP 7 dan mengapus mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah, hanya karena menganggap Pancasila seakan-akan menjadi alat dari Orde Baru. Pancasila memudar dari ingatan kolektif bangsa Indonesia. Akibatnya, masuklah ideologi-ideologi trans-nasional ke Indonesia, seperti: bahaya bangkitnya kembali komunisme,

liberalisme-kapitalisme dan ekstrimisme keagamaan. Berhadapan dengan hal tersebut, Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan PKI/Komunisme dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Tap MPR RI Nomor I Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Setelah keluarnya Tap MPR RI Nomor I Tahun 2003 itu, MPR sudah tidak memiliki wewenang untuk membuat Tap MPR yang bersifat mengatur keluar (*regelling*).

Ideologi Pancasila tetap menganut nilai-nilai partikular yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila yang tidak bisa begitu saja menerima nilai-nilai HAM internasional yang atas nama kebebasan individual melegalkan adanya perkawinan sejenis (kasus LGBT). Dalam ajaran agama sesuai dengan sila Ketuhanan, bangsa Indonesia menolak diundangkannya perkawinan sejenis seperti yang mulai diusung dalam undang-undang di Singapura mendukung pencabutan UU anti homoseksual maupun di Thailand.

Selanjutnya ideologi lain yakni ekstrimisme keagamaan. Beberapa survey sangat mengkhawatirkan kita. Ada survey dari Alvara Research tahun 2017 yang mengungkapkan ada 19,4% ASN tidak setuju ideologi

Pancasila, tetapi lebih setuju khilafah³³. Begitu dahsyatnya pengaruh ekstrimisme keagamaan mulai dari paham intoleransi (tidak mau menerima perbedaan antara kita, tidak mau menerima perbedaan antar suku dan agama sampai tindakan yang paling ekstrim, mereka melakukan aksi bom bunuh diri). Doktrin ini adalah karena mereka menganggap bahwa Pancasila adalah produk kafir, produk barat, bertentangan dengan ajaran Islam dan oleh karenanya negara ini mesti dibasmi.

Berhadapan dengan tantangan atas eksistensi Pancasila, dibutuhkan kondisi untuk menghadirkan penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etik, norma, dan moral bangsa. **Pertama**, nilai-nilai Pancasila mesti disiapkan di dalam pendidikan formal bagi kaum muda. **Kedua**, aspek kepemimpinan menjadi isu penting dalam pembangunan tatanan sosial, budaya, dan politik masyarakat yang berorientasi kepada etik, norma, dan moral Pancasila. **Ketiga**, sistem hukum mesti sepenuhnya dikuatkan dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dalam wilayah NKRI. Harus diakui, etika, norma, dan moral Pancasila belum

³³ Merujuk data Kementerian PAN-RB jumlah PNS per 30 Juni 2019 sebanyak 4.287.526 jiwa artinya ada 831.787 ASN tidak setuju ideologi Pancasila. Dari survey yang dilakukan PPIM UIN Syarif Hidayatullah 33% guru setuju terhadap anjuran berperang wujudkan negara agama. Survey Cisform 2018 36,5% mahasiswa kampus Islam setuju negara khilafah. Survey BNPT 2018 di 7 kampus ternama (UI, ITB, IPB, Undip, ITS, Unair, UBraw) terpapar ekstrimisme keagamaan.

sepenuhnya menjiwai produk perundang-undangan kita, termasuk di dalamnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya. **Keempat**, pengaruh neoliberalisme yang telah memasuki tetanan ekonomi-politik di Indonesia sejak dekade 1980-an melahirkan ironi kesenjangan ekonomi. Bagaimana ekonomi yang berkerakyatan dapat diperjuangkan dengan memberi jaminan usaha bagi UMKM, menyiapkan akses modal, distribusi yang berkeadilan dan merata bagi masyarakat luas menjadi jaminan sosial-ekonomi rakyat Indonesia. **Kelima**, perlunya Pancasila merespon perubahan untuk semakin menguatkan diri sebagai ideologi terbuka agar sanggup bertahan menghadapi angin perubahan. **Keenam**, kemampuan meredam potensi konflik kekerasan yang bersifat transnasional dengan cara memutus mata rantai organisasi berhaluan berseberangan dengan ideologi Pancasila di wilayah NKRI³⁴.

Diharapkan sebagai Prajurit TNI Saptamargais, komitmen pada soliditas TNI, pada kualitas sesuai jabatan masing-masing mesti semakin melekat pada jati diri Hakim Militer TNI, sehingga mampu mengantisipasi dinamika masyarakat di era globalisasi ini dengan melaksanakan pembinaan mental ideologi yang terarah

³⁴ Op.cit., *DAS-BIN*, 2017, hal. 261-276.

dan berkesinambungan. Jika Hakim Militer abai dalam memelihara karakter moral TNI akan Pancasila ini moral dan moril prajurit akan menjadi lemah dan tentunya ancaman disintegritas bangsa akan semakin potensial.

C. Bintal Kejuangan

Ada beberapa karakter bangsa saat ini sedang mengalami degradasi, seperti lemahnya kejujuran, tidak amanah, kurang mandiri, rendahnya etos kerja, menerabas, hura-hura, rendahnya inovasi, kurang disiplin, dan lain-lain. Pada sementara generasi muda, berkembang sikap gengsian, etos kerja rendah, kurang kerja keras, kurang disiplin, intelektualis, tidak mandiri, bahkan hura-hura, kurang inovatif dan formalistis. Dampak dari semua itu, lahir pandangan yang rendah seperti orientasi ke kinian kurang berorientasi ke depan, orientasi simbol seperti mementingkan ijazah, titel bukan kualitas. Akibat hura-hura, waktu terbuang dan akhirnya lambat mandiri seperti telah lulus S1 bahkan S2 masih tidak mandiri, dewasa dipaksakan, kurang berkembang, kurang prospektus, pengangguran, lari ke narkoba, dan perilaku menyimpang lainnya. Sebuah negara bangsa menjadi maju bilamana setiap individu penduduk Indonesia mampu mengembangkan beberapa karakter

unggul untuk menyongsong masa depannya. Beberapa karakter unggul tersebut, antara lain.

1. Karakter mandiri yang didukung oleh sikap kerja keras dan tidak gengsian.
2. Kreatif dan inovatif yakni selalu berupaya untuk menemukan gagasan dan temuan baru bagi kehidupan yang sejahtera.
3. Disiplin dan cinta kualitas dengan menghindari sikap seadanya, hura-hura, dan formalistis. Untuk semua itu perlu ditelorkan berbagai kebijakan yang mendukung proses pelestarian jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan 45 di seluruh wilayah tanah air Indonesia.

Ada hal penting dalam pelestarian nilai nilai kejuangan yaitu jiwa, semangat dan nilai kejuangan 45 telah terbukti kehandalannya dalam perjuangan, pencapaian kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan. Juga terbukti kehandalannya bagi kelestarian kehidupan berbangsa dan bernegara, hingga saat ini. Oleh sebab itu bagi kita bangsa Indonesia harus bertekad baik secara individu, keluarga dan masyarakat untuk melestarikan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan 45, tentu melalui penghayatan, penerapan dan pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bertekad untuk menyebarluaskan atau mentransformasikan kepada generasi di belakang kita. Setiap kita bangsa Indonesia, lebih-lebih lagi

bagi personel TNI sebagai Penerus Pembudayaan Kejuangan 45, harus secara sadar memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang termuat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, nilai dasar yang termuat dalam setiap sila dari Pancasila, dan semua nilai yang terdapat dalam UUD 1945.

1. Jiwa, Semangat, Nilai Kejuangan 45 dan Realitas Keyakinan.

Ada dua kondisi yang muncul dalam diri prajurit yaitu Ketuhanan yang Hampa dan . Nasionalisme yang rendah. Dalam kondisi Ketuhanan yang hampa dapat diketahui bahwa sebagian besar rakyat Indonesia belum menghayati agamanya secara benar sehingga muncul egoisme agama yang sejak berdirinya Republik ini telah dicermati agar tidak terjadi hal seperti itu. Fanatik boleh asalkan jangan sampai kepada fanatik sempit, meyakini absolutisme agama harus, tetapi pemaksaan agama terlarang. Hubungan internal, antar maupun hubungan antara umat beragama dengan pemerintah harus berjalan harmonis. Begitu pula dengan penghayatan Ketuhanan yang masih dangkal, agama cenderung formalistik sehingga tidak berdampak positif bagi pemeluknya. Narkoba, korupsi, manipulasi semua muncul di kalangan mereka yang beragama bukan mereka yang tidak beragama, tetapi disebabkan Tuhan secara hakiki tidak

hidup dalam hati mereka, bahkan Tuhan telah diganti dengan tuhan-tuhan kecil seperti harta maupun tahta.

Adapun jiwa nasionalisme yang rendah dapat dilihat bahwa nasionalisme bangsa Indonesia saat ini kadang masih diperbincangkan, sehingga nasionalisme hanya lip service saja. Kenyataannya bukan merasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa tetapi keserakahan pada segelintir orang-orang yang berduit dan hedonisme. Melalui penerapan sistem demokrasi, masyarakat seyogyanya merasa terayomi kehendak dan aspirasinya, sehingga benar-benar merasakan adanya keadilan, kesamaan hak dan kewajiban dalam hidup berbangsa dan bernegara. Banyak permasalahan yang karena kepentingan-kepentingan tertentu sudah mengabaikan hakikat nasionalisme, dari mulai tatanan yang tertinggi sampai dengan tatanan yang terendah yang tersebar di masyarakat yang luas, padahal pada hakikatnya nilai-nilai yang diwariskan oleh para pejuang kita adalah Nasionalisme yang berarti apapun yang harus dilakukan yang diperjuangkan sampai darah titik penghabisan membela Nasionalisme akan berdirinya negara kesatuan Indonesia, walaupun berbagai ragam macam agama, ras, golongan, suku tetapi tetap satu tujuan yaitu Indonesia merdeka, berdaulat adil dan makmur.

2. Nilai-Nilai 45 dan Pembangunan Bangsa

Menyangkut nilai-nilai operasional yang muncul dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia selama ini, secara umum juga harus dijadikan spirit dalam perjuangan mengisi kemerdekaan atau dalam setiap langkah pembangunan sekarang ini. Akan tetapi analisis kita terhadap situasi dan kondisi juga perlu menjadi perhatian sehingga mungkin sekali dari 17 nilai operasional itu, dipilih prioritas nilai mana yang mendesak untuk diamankan. Contoh, saat ini di kalangan PNS ada 5 nilai kepegawaian yang harus diamankan oleh setiap PNS yaitu nilai bertanggungjawab, etika publik, nasionalisme, komitmen mutu, disiplin dan anti korupsi. Nilai-nilai operasional ini meliputi:

- a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Jiwa semangat merdeka
- c. Nasionalisme
- d. Patriotisme
- e. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka
- f. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah
- g. Persatuan dan kesatuan
- h. Anti penjajah dan penjajahan

- i. Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya pada kekuatan dan kemampuan diri
- j. Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya
- k. Idealisme kejuangan yang tinggi
- l. Berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara
- m. Kepahlawanan
- n. Sepi ing pamrih rame ing gawe
- o. Kesetiakawanan, senasib seperjuangan dan kebersamaan
- p. Disiplin yang tinggi
- q. Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan

Dalam konteks lapisan generasi, maka generasi yang lebih tua hendaknya menjadi teladan dan rujukan bagi generasi yang lebih muda, demikian secara hirarki, jangan terbalik. Generasi yang duduk dalam kekaryaan saat ini harus menjadi contoh dan rujukan bagi setiap generasinya. Ketakwaan kepada Tuhan YME seyogyanya menjadi dasar utama dalam menapaki kehidupan, menapaki perjuangan mengisi kemerdekaan, dimana dan pada poisisi apa saja. Takwa dalam konteks Islam berarti menaati ketentuan kauniah dan qauliah

Allah sehingga menjadi manusia yang seimbang dalam kehidupan ini. Umat beragama harus menerapkan prinsip berbangsa dan bernegara yang membuahkan keselamatan, ketenteraman dan kesejahteraan hidup bersama. Kehidupan yang penuh keselamatan, ketenteraman dan kesejahteraan bilamana disadari status manusia sebagai “abdullah” dan “khalifatullah”, terhindar dari keserakahan, pragmatisme, sekularisme, kapitalisme bahkan sikap individualisme dan egoisme yang melahirkan kolusi, korupsi dan nepotisme. Semoga kita semua selalu memperoleh bimbingan Allah SWT dalam menjalankan tugas sesuai dengan peran, tugas dan tanggungjawabnya.

3. Jiwa dan Semangat Perjuangan 45

Perjuangan kemerdekaan menghantarkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Berbagai upaya untuk mencapai kemerdekaan sesuai sejarah didahului oleh semangat anti penjajahan yang tercermin dalam berbagai kelompok dan organisasi masyarakat maupun sikap-sikap individu para pemuka agama maupun pemuka masyarakat terhadap pentingnya kemerdekaan. Semangat juang yang tinggi menjadikan seluruh rakyat Indonesia bahu membahu bergotong royong mengumpulkan tenaga, dana dan bahan

makanan yang disediakan untuk para pejuang kemerdekaan. Seluruh anggota masyarakat terlibat langsung dalam menyediakan sumbangan besar atau kecil, tidak ada yang berdiam diri atau berpangku tangan. Satu tujuan utama adalah bagaimana agar Belanda hengkang dari bumi pertiwi Indonesia ini. Semangat keberanian yang luar biasa dengan hanya bersenjata bambu runcing, mandau, tombak dan golok melawan Belanda yang memakai senjata api saat itu. Cita-cita luhur untuk merdeka melenyapkan kelelahan, kesusahan, pengorbanan tanpa batas dan tanpa pamrih, semata-mata mengharapkan keridhaan Tuhan Sang Pencipta sehingga tidak takut mati karena berharap menjadi syuhada yang tetesan darahnya menjadi harum semerbak dinikmati jerih payah dan pengorbanannya oleh para generasi yang akan datang. Semangat jihad menggelora di dalam dada para pejuang yang mendapatkan dorongan dan dukungan dari seluruh rakyat yang berada di belakang para pejuang. Semangat bersatu kita kuat dan bercerai kita runtuh menjadi ikatan batin seluruh rakyat waktu itu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semangat juang yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita lengkaplah sudah apabila kita bisa mentauladani dan diimplementasikan dalam

kehidupan sehari-hari dalam rangka mendukung tugas pokok sesuai dengan peran dan tugas serta tanggungjawabnya masing-masing yang secara umum adalah bangsa Indonesia, kepribadian yang ditumbuhkan dari nilai-nilai semangat juang tersebut antara lain adalah:

a. Nilai-nilai ketauladanan/keperwiraan. Bahwa para pahlawan yang berjuang menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, membangun semangat kemerdekaan yang bahu membahu mewujudkan cita-cita bangsa tentunya dilakukan secara ikhlas dan sadar bahwa inilah kewajiban anak bangsa, tanpa ada yang diharapkan selain kemerdekaan, sikap jujur dan adil dalam meraih kemerdekaannya diimplementasikan dalam perjuangannya untuk merebut suatu harapan bersama yaitu kemerdekaan yang sampai sekarang dinikmati oleh para generasinya.

b. Nilai-nilai semangat rela berkorban. Dalam perjuangannya kita sudah tahu bahwa para pahlawan dalam memerangi para penjajah di muka bumi Indonesia, bukanlah isapan jempol belaka, mereka tidak ada perhitungan laba rugi tetapi apapun yang dapat mereka kerahkan, apapun yang dapat disumbangkan mereka rela mengorbankannya,

tenaga, keringat, kesempatan, harta benda, keluarga bahkan jiwa raga sampai darah titik penghabisan mereka rela korbankan demi kemerdekaan Negara Republik Indonesia, nah kita sebagai generasi penerus mengisi kemerdekaan dengan karya yang nyata korbankan pikiran, ide gagasan, luangkan waktu untuk memenuhi cita-cita para pahlawan bangsa yang telah rela mengorbankan segalanya.

c. Nilai-nilai pantang menyerah. Berbagai cara, strategi serta peralatan perang yang sangat terbatas bila dibandingkan dengan para penjajah, siang malam tak kenal lelah, tak kenal waktu, jiwa pantang menyerah demi satu cita-cita yang luhur, agar Indonesia makmur kelak maka mereka berbuat dan berjuang demi kemerdekaan Indonesia dengan nilai-nilai yang terkandung dalam jiwa dan raganya, pantang menyerah sebelum menang, sekali perahu berlayar pantang biduk balik ke pantai sebelum menang pantang menyerah kembali ke rumah, sebelum mendengar kata-kata Merdeka.³⁵

D. Bintal Kejiwaan

³⁵ Ahmad Ali Rosidi, *Jiwa Semangat dan Nilai-Nilai 1945*, Sumber: PSP PGRI Semarang 2007, <http://ahmadalirosidi.blogspot.co.id/2012/04/blog-post.html>), di down load, 20 Oktober 2016

Menurut Prof. Dr. Sudjito Atmorejo, mengatakan bahwa berbicara tentang hukum senantiasa terkait dengan manusia, kemanusiaan, psikologi, dan seluruh aspek kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari ranah teori-teori hukum, maupun teori lainnya termasuk teori psikologi. Misal, teori keadilan dari Tarde dan Petrazhitsky. Menurut Petrazhitsky, persepsi hakim tentang keadilan sangat dipengaruhi unsur subjektif dan intuitif hakim tentang perkara yang diadilinya. Objektivitas, netralitas, universalitas suatu perundang-undangan, serta intelektualitas hakim, hanyalah bagian kecil dari variabel yang menentukan kadar keadilan dalam vonis hakim. Selebihnya, unsur rohaniah, batiniah, kejiwaan hakimlah yang dominan menyetir sikap, perilaku, dan putusan hingga terwujud dalam bentuk vonis.³⁶

Lebih luas dari pandangan Petrazhitsky, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum itu lebih berkaitan dengan ikhwal psikis (*mind*) daripada pengetahuan (*sophia*). Oleh karena itu maka masalah-masalah hukum hendaknya lebih didalami dari segi psikologis daripada pengetahuan rasional. *Behavioral jurisprudence* memiliki saham besar dalam menampilkan hubungan antara hukum dan psikologi.³⁷

³⁶ Sudjito. A, *Pones Hakim Dalam Presfektif Psikologi*, Koran Bernas, 2021

³⁷ Albert A.Ehrenzweig, *Psychoanalytic Jurisprudence*, 1971

Ilmuwan lain yang memberikan perhatian besar terhadap sikap dan motivasi hakim dalam memutus perkara adalah Glendon Schubert. Sebagaimana dikutip oleh Lord Lloyd of Hampstead. Schubert meyakini bahwa sikap hakim merupakan faktor dominan dalam pengambilan putusan, yang lebih menentukan dari pada yang lain. Bahkan Schubert dengan tegas menepis pengaruh faktor-faktor lain, seperti: pendidikan, tradisi, maupun penalaran.³⁸ Maknanya, sikap hakim dalam memeriksa, mengadili dan membuat vonis itu ditentukan oleh sikap subjektifnya. Seorang hakim bersikap menerima, ataukah menolak suatu keterangan saksi, kebenaran alat bukti, maupun keterangan para pihak, sesungguhnya merupakan pilihan-pilihan yang diyakininya tepat. Itulah keadilan subjektif. Di situlah dimensi psikologis vonis hakim.

Realitas empiris di dunia peradilan (khususnya di Indonesia) menunjukkan, bahwa selama ini dimensi psikologi itu kurang diperhatikan. Bahkan terkesan, komunitas hukum (utamanya penganut positivisme) tidak berkenan, jika ontologi ilmu hukum dicampuri urusan-urusan psikologi, politik, ideologi, ekonomi, budaya dan unsur-unsur lain. Apa yang diinginkan dan dipraktekkan hanyalah sebatas hukum positif, perundang-undangan saja, sehingga bunyi teksnya diupayakan ditafsir secara logis-rasional semata, tanpa hirau

³⁸ Rahardjo, *Introduction to Jurisprudence*, 1996

terhadap dimensi-dimensi lain. Dari sikap positivistik itulah maka muncul kritik bernuansa sarkastis: hakim hanyalah "*bouche de la loi*" (corong undang-undang) saja. Implikasi dari sikap positivistik itu antara lain muncul keadilan formal dari suatu proses peradilan, yakni adil ketika dipandang sudah sesuai dengan bunyi teks undang-undangnya. Dari sanalah, lebih lanjut hakim merasa berwenang memunculkan berbagai definisi-definisi atau nomenklatur sendiri yang dipandang khas dan tidak dimungkinkan ditafsirkan lain oleh pihak lain.

Dalam perspektif Bintel psikologi seorang hakim harus memiliki kematangan jiwa yang tercermin dalam tiga aspek yang perlu mendapat perhatian serius.³⁹ yaitu; *Pertama*: Tahan terhadap tekanan/stress contoh, seorang Hakim tidak memutus sebuah perkara dalam keadaan emosi, lapar, sakit atau dipengaruhi oleh kekuatan lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW; "*Seorang hakim tidak boleh memutus perkara di antara dua orang yang berperkara dalam keadaan marah.*" (HR Bukhari Muslim). *Kedua*, Integritas; seorang harus memiliki integritas yang kuat. Hakim tidak boleh menerima hadiah dari seseorang yang tidak pernah memberinya hadiah sebelum diangkat menjadi hakim. Sabda Rasulullah SAW; "*Barangsiapa yang kami angkat untuk mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian kami memberinya rezeki (gaji), maka sesuatu yang didapatkannya setelah itu adalah*

³⁹ Ibid.

pengkhianatan." (HR Abu Daud dan Hakim). Senada dengan itu Nabi SAW bersabda; "*Laknat Allah terhadap penyuap dan penerimanya dalam menetapkan hukuman.*" (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi). *Ketiga*, seorang hakim juga tak boleh memutus perkara tanpa adanya saksi, tidak boleh memutus perkara yang ada kaitan dengan dirinya, seperti perkara anaknya, bapaknya atau istrinya. Tidak boleh menerima suap dalam menetapkan hukuman.

III. PENUTUP

Sebagai penutup dari uraian naskah di atas, disampaikan kesimpulan, saran, dan rekomendasi adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum.

Dari uraian yang telah dikemukakan tentang konsep pembinaan mental dalam membangun karakter Hakim Militer dapat disimpulkan, bahwa pembinaan mental memiliki peran strategis dalam membangun karakter Hakim Militer, karena pembinaan mental TNI mampu mengembangkan dan membentuk watak kepribadian personel TNI yang diarusutamakan untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI.

2. Kesimpulan Khusus.

- a. Pembinaan Mental Rohani, yang ditransformasikan dengan nilai-nilai agama (keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa) dengan efektif dapat menjadi fondasi dalam membangun karakter Hakim Militer yang berintegritas tinggi.
- b. Pembinaan Mental Ideologi, menjadi pedoman dalam membangun karakter Hakim Militer yang memiliki jiwa nasionalisme dengan dilandasi nilai-nilai Pancasila, Saptamarga dan Sumpah Prajurit.
- c. Pembinaan Mental Tradisi Kejuangan, merupakan pewarisan nilai kepahlawanan dapat menjadi motivasi dalam membangun karakter Hakim Militer yang memiliki militansi tinggi dalam memperjuangkan keadilan.
- d. Pembinaan Mental Kejiwaan, Hakim Militer merupakan *support* bagi Hakim Militer agar memiliki kematangan jiwa sehingga mampu menginternalisasikan ketiga komponen Bintal.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah uraikan maka perlu adanya saran sebagai berikut:

1. Para Hakim Militer merupakan pilar utama dalam menegakkan hukum di lingkungan TNI disamping

memedomani kode etik hakim, namun dituntut untuk memiliki karakter yang dilandasi dengan nilai-nilai pembinaan mental TNI sehingga pola sikap, pikir dan tindakannya sesuai dengan jati diri prajurit TNI.

2. Profesi Hakim Militer merupakan amanah yang mulia dituntut untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional sehingga mampu mentransformasi isyarat-isyarat keadilan.

3. Hakim Militer merupakan profesi yang sangat mulia, bahkan profesi hakim dianggap sebagai "Wakil Tuhan di Dunia", agar termotivasi untuk menjunjung tinggi kehormatannya.

4. Hakim Militer hendaknya dapat mengimplementasikan empat komponen pembinaan mental TNI dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan kedinasan maupun di masyarakat.

5. Hakim Militer sebagai prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya tetap berpedoman kepada Saptamarga sehingga pola pikir, sikap dan tindakannya akan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

C. Rekomendasi

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada kesimpulan, maka dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. **Kepada Ketua Mahkamah Agung RI.** Mohon dapat dikembangkan kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan Pusat Pembinaan Mental TNI dalam penguatan karakter.
2. **Kepada Kababinkum TNI.** Mohon dapat dikembangkan kerjasama antara Babinkum TNI dan Pusbintal TNI dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis di lingkungan TNI.

Jakarta, November 2022

Kepala Pusat Pembinaan Mental TNI,



Drs. Ian Heriyawan, CHRMP.
Laksamana Pertama TNI

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Internet:

1. Abdulhak, Ishak. (2000), *Metodologi Pembelajaran Orang Dewasa*, Bandung: CV. Andira
2. Majid Abdul, Andayani Dian, (2015). *Pendidikan karakter perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya
3. Akdon. (2006). *Manajemen Stratejik Untuk Manajemen Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta
4. Ali A.R. *Jiwa Semangat dan Nilai-Nilai 1945*, (2007), Semarang: PSP PGRI, <http://ahmadalirosidi.blogspot.co.id/2012/04/blog-post.html>), di download, 20 Oktober 2016
5. A.F. Jaelani. (2001), *Penyucian Jiwa: (Tazkiyat Al-Nafs) dan Kesehatan Mental*, Jakarta: Amzah.
6. Ginanjar Ary (2001), *ESQ Emotional Spritual Quotient Rahasia sukses membangun kecerdasan emosi dan spiritual*, Jakarta: Jakarta Arga
7. Bogdan dan Taylor. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya
8. Daradjat, Zakiyah. (1984), *Kesehatan Mental Peranannya dalam Pendidikan dan Pengajarannya*, Jakarta: Gunung Agung
9. Departemen Agama Republik Indonesia. (2004), *Pola Pembinaan Akhlak Mahasiswa IAIN*, Jakarta: Dirjen Binbaga Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam

10. Depdikbud. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
11. Harjana, Mangun (1991). *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, Yogyakarta: Kanisius
12. Jalaluddin (1997), *Psikologi Agama*, Jakarta: Rajawali
13. James F. Vandersloot, SH, MH, *Upaya Mesujudkan Peradilan Militer yang Bersih dan Berwibawa*, [https://dilmil-madiun.go.id.](https://dilmil-madiun.go.id/), diunduh, 27 Oktober 2022.
13. Kartini Kartono (1996), *Psikologi Umum*, Bandung: Mandar Maju
14. Lickona Thomas, (1992), *Educating for Character: How Our School can Teach Resoect and Responsibility*,
15. Latif, (2002), *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas*, Penerbit Gramedia, Jakarta, hal. 420-452.
16. Lim Hendrik, (2016). *Indonesia Baru Mental Baru* : Depora Publisher
17. Muhammad Suardi, *Pengantar Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, 2006
18. Mulyasa. E. (2012). *Manajemen Pendidikan Karakter*, Jakarta. : Bumi Aksara
19. Mulyasa. E, (2014). *Revolusi Mental Dalam Pendidikan*, Bandung. Penerbit : Remaja Rosdakarya
20. Mulyono. (2012), *Strategi Pembelajaran*, Malang: UIN Maliki Press
21. Natsir Nanat, (2009) *Membangun Masa Depan Bangsa Melalui Etika Dan Moral elit Politik Guna Mewujudkan Kepemimpinan Nasional Yang Kuat*, Nusantara Education Review.
22. Nurliah Nurdin . (2020) *Kuliah Umum Sistem Manajemen Nasional*, Dikreg XLVII Sesko TNI, Bandung

23. Rakhmat Jalaluddin. (1996) *Renungan Sufistik*, Bandung: Mizan
24. Sanusi, Achmad (2015), *Sistem Nilai*, Bandung: Nusa Cendekia
25. Sauri, Sofyan. (2016). *Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Rizqi Press.
26. Seminar Nasional (2017), *Aktualisasi Nilai-Nilai Kesatuan dan Persatuan Dalam Kebhinekaan* , Dikreg XLIV Sesko TNI: Bandung
27. Seminar Nasional (2018), *Optimalisasi Kewaspadaan Nasional Guna Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan NKRI*: Bandung
28. Sudjana, Djudju (2000). *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung; Falah Production
29. Sudjito. A (2021), *Pones Hakim Dalam Prespektif Psikologi*, Koran Bernas.
30. Sukarjo, M dan Ukim Komarudin (2012). *Landasan Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
31. Tafsir Ahmad, (2008). *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosda karya
32. Tafsir Ahmad, (2010), *Filsafat Pendidikan Islami*, Bandung: Remaja Rosda karya.
33. Tim Dewan Analisis Strategis - Badan Intelijen Negara, *Ketahanan Ideologi Pancasila 2018-2030*, Penerbit DAS-BIN, 2017, hal. 9-19.
34. Tobroni, (2005), *The Spiritual Leadership (Pengefektifan Organisasi Noble Industry Melalui Prinsip-prinsip Spiritual Etis*, Malang: UMM Press
35. Wibowo, *Optimalisasi Kewaspadaan Nasional*, 2018

36. Teks Amanat Presiden RI, Sukarno, pada Hari Ulang Tahun Angkatan Perang ke-5, <https://anri.sikn.go.id>, diunduh 27 Oktober 2022.

Perundangan dan Peraturan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Tentang *Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*
3. Peraturan Panglima TNI, tentang *Jukref, Bintel Pinaka Baladhika Utama*, (2022) Pusbintel TNI
4. Pusbintel TNI, *Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Mental Ideologi di Lingkungan TNI*, 2018, hal.5.

Artikel Jurnal :

1. Firdaus, (2014), "Upaya Pembinaan Rohani Dan Mental" Jurnal Studi Lintas Agama, Volume 9, Nomor 1
2. Ilyas, A. (2017). "*Studi Kritis Konsep Dan Aplikasi Pembinaan Mental TNI AD*". *Jurnal Humaniora*, <https://doi.org/10.31227/osf.io/tebn>
3. IW.Warka.(2018). "*Implementasi Pembinaan Mental Fungsi Komando Sumber Daya Manusia di Lantamal III Jakarta*", *JurnalStrategiPertahananLautjurnalprodi.idu.ac.id*
4. Ma'arif, Syamsul,(2014). "*Prajurit Profesional-Patriot: menuju TNI Profesional pada Era Reformasi*". *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Volume.19, Nomor.2 Juli 2014: 257-286.
5. Marlina, Leni, (2015) *Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam pendidikan*, *Jurnal UIN Raden Fatah Istinbath/Nomor.15/Th. XIV/Juni/2015/123-139*

6. Mulyasa, E. (2011), "*Memahami dan Memaknai Pendidikan Karakter*", Nusantara Education Review. Volume.5. Nomor.1, Januari-Juni 2011

Jakarta, November 2022

Kepala Pusat Pembinaan Mental TNI,



Drs. Ian Heriyawan, CHRMP.
Laksamana Pertama TNI



KONSEPSI PEMBINAAN MENTAL DALAM MEMBANGUN KARAKTER HAKIM MILITER

PUSBINTAL TNI